



**Judul** : Batasi dampak teknologi, komisi XII usulkan regulasi khusus AI  
**Tanggal** : Sabtu, 30 Mei 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3

## Batasi Dampak Teknologi Komisi XIII Usulkan Regulasi Khusus AI

ANGGOTA Komisi XIII DPR Marinus Gea mendorong pembentukan lembaga khusus mengatur penggunaan Kecerdasan Buatan (AI). Perkembangan teknologi modern ini tidak lagi dapat dipandang hanya dari perspektif kekayaan intelektual. Karena itu, pembahasannya tidak boleh sebatas perubahan UU Hak Cipta saja.

Kata Marinus, dampak AI telah meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat, serta berpotensi memengaruhi banyak sekali regulasi. Pendekatan parsial dengan mengubah aturan satu per satu justru berisiko menimbulkan persoalan baru. Langkah itu tidak tepat dan bakal menciptakan tumpang tindih kebijakan Pemerintah di masa mendatang.

Seluruh regulasi UU, kata dia, akan terdampak jika Pemerintah hanya mengurus satu aspek saja dari kemajuan teknologi itu. Dampak AI itu nyata pada aturan hak merek, desain industri, serta paten. "Bahkan saat ini seluruh aspek kehidupan manusia sudah dipengaruhi keberadaan sistem AI," terangnya, Kamis (28/5/2026).

Teknologi AI lanjut Marinus, merupakan rezim baru yang dalam penanganannya membutuhkan pendekatan lintas sektor. Pengaruh AI tidak hanya menyentuh aspek kekayaan intelektual seperti hak cipta saja. Sektor hukum, teknologi, ekonomi digital, hingga persoalan kemanusiaan juga berpotensi terdampak perkembangan AI.

Dia mengingatkan Pemerintah tidak hanya fokus menyelesaikan persoalan di bagian hilir saja. Langkah regulasi kuat harus dibangun dari akar masalah agar tidak jadi benang

kusut nantinya. "Pengambil kebijakan tidak boleh melihat persoalan besar ini semata dari kerangka kekayaan intelektual saja," tegasnya.

Marinus mengungkapkan, perkembangan regulasi AI di sejumlah negara seperti AS juga masih menghadapi tantangan nyata. Hambatannya terutama dalam penyusunan sistem perlindungan hasil teknologi itu. Sementara di Eropa, pendekatan hukum lebih diarahkan pada perlindungan alat yang digunakan dibanding hasil dari AI itu sendiri.

Kondisi global itu jadi sinyal kuat bahwa Indonesia harus segera menyiapkan aturan tata kelola AI komprehensif sejak dini. Langkah cepat ini harus dilakukan agar negara tidak tertinggal jauh. "Terutama di tengah laju pesatnya perkembangan teknologi modern yang terus terjadi saat ini," ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pa-reira menegaskan agar Indonesia segera membangun regulasi komprehensif. Aturan itu dibuat untuk mengantisipasi dampak dari perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan atau AI. Regulasi ini difokuskan khususnya terhadap perlindungan hak cipta serta kepentingan nasional negara.

Kata dia, DPR bersama Pemerintah tengah berupaya mengantisipasi kekosongan regulasi akibat perkembangan teknologi AI yang berlangsung sangat cepat. Dampak paling kelihatan berada di dalam ranah hak cipta. Kemanafaatan sistem pintar ini sekarang telah jadi bagian erat dari segala aspek kehidupan kita semua. ■ PVB